

PEREMPUAN DAN KORUPSI PADA RANAH PUBLIK (Ditinjau dari Gaya Kepemimpinan, Politik, Agama, Psikologi dan Budaya Ketimuran)

Dewi Sekar Kencono dan Bhakti Wisnu Wardhana

ABSTRAKSI

Corruption is a transnational crime that involves many parties together in the eradication and prevention efforts. The emergence of several names of women involved in cases of corruption in the public good of members of political parties and public officials in the spotlight for several years. Women who are entangled in corruption cases occurred basically due to not knowing the details of the risk positions and the pressure to be received from the position of being diembanya. Judging from the style factor of leadership, political, religious, psychological and oriental cultures all indirectly become patron of women from the bondage of corruption. This is due to the limitations that can not be passed by women both normative and outwardly.

Keyword: *women, corruption, public*

A. PENDAHULUAN

*Gawean utama wong wedok iku masak, macak, lan manak. Merga iku, wilayahe dapur, sumur, lan kasur kanthi gawean: isah-isah, umbah-umbah, lan lumah-lumah.
(Dikutip secara bebas dari Hersri,1981)*

Kalimat-kalimat dalam kasusastran Jawa tersebut setidaknya menegaskan bahwa perempuan tidak akan pernah berada di depan sebagai pemimpin. Ketidakadilan tersebut menempatkan perempuan sebagai subordinasi laki-laki, namun perempuan justru menikmati kenyataan tersebut. Hal itu dikonstruksikan melalui sistem sosial, budaya, dan hukum sehingga keberadaan perempuan tidak dirasakan sebagai penindasan baginya karena proses tersebut telah berlangsung berabad-abad dan dari generasi ke generasi. Laki-laki sebagai pihak penindas juga tidak merasa menindas perempuan. Dengan demikian, gejala semacam ini dianggap sebagai hal yang biasa. Pada giliran selanjutnya, maka terjadilah diferensiasi peran berdasarkan jenis kelamin (cf. Budiman, 1982). Oleh karena itu, dalam sistem sosial dikenal sektor publik (*public sector*) dan sektor domestik (*domestik sector*). Sektor public distereotipkan sebagai wilayah laki-laki sedangkan sektor domestik distereotipkan sebagai wilayah perempuan (cf. Abdullah, 1997).

Secara *historis*, stereotip perempuan dapat dilihat dari tiga aspek: biologis, psikologis, dan mitologis. Secara biologis (fisik), perempuan lebih lemah daripada laki-laki, secara psikologis perempuan merupakan sosok yang lebih dikendalikan oleh emosi dalam bertindak, suka dilindungi, tidak menyukai tantangan, dan serba lembut, sedang secara mitologis yang bersumber dari ajaran agama dan mite-mite tertentu, hampir selalu menempatkan perempuan merupakan subordinasi laki-laki. Secara kultural, budaya Jawa berpandangan bahwa tugas seorang perempuan adalah macak 'berhias', masak 'memasak', dan manak 'melahirkan' dengan wilayah operasi dapur, sumur, dan kasur. Dalam pandangan hidup orang Jawa, juga dikenal tiga kesetiaan seorang perempuan, yakni ketika kecil harus patuh kepada orang tua, ketika dewasa harus patuh kepada suami, dan ketika tua harus patuh kepada anak-anaknya. Sedangkan secara sosial, nilai-nilai di atas dilembagakan dalam semua aspek kehidupan: hukum, politik, dan pranata sosial. Berbagai faktor itulah yang akhirnya membentuk stereotip perempuan.¹

Melihat tataran stereotip perempuan yang seperti tersebut, pemberitaan media massa belakangan ini banyak diramaikan dengan berita kasus korupsi yang melibatkan perempuan dirasa sangat mengganggu. Belum terselesaikannya beberapa kasus korupsi besar yang mengguncang perpolitikan negeri ini mulai dari kasus Century yang membelit Sri Mulyani yang sekarang berada di *World Bank*, kasus penggelapan dana nasabah Malinda Dee, kasus cek pelawat yang melibatkan Nunun Nurbaeti dan Miranda Goeltom, dan yang terbaru kasus dugaan keterlibatan Wa Ode Nurhayati (Fraksi PAN) dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID), kasus Wisma Atlet dan *Sport Centre* Hambalang yang melibatkan banyak sekali perempuan di dalamnya seperti Angelina Sondakh, Mindorosalina Manulang, dan Yulianis dan tak ketinggalan istri Ketua Umum Partai Demokrat, Athiyah Laila serta Hartati Murdaya pada kasus suap Bupati Buol yang masih berada dalam lingkup Partai Demokrat.

Setelah berakhirnya rezim orde baru, pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda utama di negeri ini. Persoalan korupsi di Negara Indonesia terbilang kronis, bukan hanya membudaya tetapi sudah membudidaya. Beragam lembaga, produk hukum, reformasi birokrasi dan sinkronisasi telah dilakukan, akan tetapi hal itu belum juga dapat menggeser kasta pemberantasan korupsi.

Korupsi bukan sekadar perbuatan melawan hukum, melainkan juga kejahatan kemanusiaan yang memiliki dampak buruk yang serius terhadap keberlangsungan umat manusia. Korupsi bahkan bisa menjadi salah satu faktor penyebab kegagalan negara. Noah Chomsky (2006;38) menyatakan bahwa karakteristik negara yang gagal (*failed state*) antara lain: negara tidak punya kemampuan melindungi warga negara dari berbagai bentuk kekerasan, tidak terjaminnya hak-hak warga negara, lemahnya institusi demokrasi, sikap agresif yang sewenang-wenang dari pemerintah, lemahnya penegakan hukum, serta maraknya penyalahgunaan kekuasaan.ⁱⁱ

Tercatat, sudah ada 6 kasus korupsi besar yang telah melanda negeri kita ini. Dimulai dari dugaan kasus korupsi mantan Presiden Soeharto, Kasus Korupsi Pertamina, kasus pembobolan Bapindo, hingga kasus korupsi Bank Century dan mega proyek Hambalang. Menariknya, dari keseluruhan kasus tersebut, sebagian besar pelakunya adalah laki-laki. Sangat sedikit pelaku korupsi yang berjenis kelamin wanita. Mulai bermunculannya nama perempuan dalam kasus korupsi ditengarai peran perempuan dalam banyak kasus korupsi sangat strategis. Tahun 2008, dari 22 koruptor yang ditangkap, dua di antaranya perempuan. Tahun 2011, jumlahnya meningkat dengan tujuh perempuan yang ditangkap karena kasus korupsi.

Para perempuan ini, menurut *Indonesia Corruption Watch* memainkan peranan kunci dalam praktik mafia hukum dan menjadi operator untuk mengamankan koruptor dari jeratan hukum. Di luar angka yang diungkap lembaga swadaya masyarakat itu, mungkin jumlah kaum perempuan yang terlibat korupsi lebih banyak lagi. Karena yang namanya korupsi tidak harus melibatkan sejumlah dana fantastis seperti kasus-kasus besar yang menjadi pemberitaan media massa.

Tanpa bermaksud memukul rata terhadap semua perempuan, muncul pertanyaan: inikah gambaran kaum perempuan modern zaman sekarang? Di saat sebagian kaum perempuan masih berjuang keras untuk memperjuangkan hak-haknya, di sisi lain kaum perempuan sudah banyak yang menikmati kesetaraan gender dan menduduki jabatan strategis, tapi mengapa ada perempuan yang mudah tergoda untuk melakukan praktik-praktik korupsi?ⁱⁱⁱ

Melihat keadaan seperti ini tentunya muncul pertanyaan (1) Bagaimana sebenarnya peran dan peluang melakukan korupsi antara perempuan dan laki-laki pada ranah publik? (2) Bagaimana peran perempuan dalam upaya pemberantasan korupsi di Negara ini?

B. PEMBAHASAN

B.1. Definisi Korupsi

Secara etimologi, Korupsi berawal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*, Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi. (Focus Andera dalam Prodjohamidjojo,2001:7)^{iv}

Menurut *Transparency International* (TI) :

“Corruption is operationally defined as the abuse of entrusted power for private gain.” (Korupsi adalah perlakuan yang didefinisikan sebagai penyalahgunaan dari kekuasaan yang dipercayakan untuk pendapatan pribadi.)^v.

Menurut World Bank korupsi didefinisikan sebagai berikut :

“Corruption is the abuse of public office for private gain.”(Korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi)^{vi}.

KPK dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada UU NO.31/1999 jo UU No.20/2001 menyebutkan bahwa pengertian korupsi mencakup perbuatan^{vii}:

- Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan /perekonomian negara (pasal 2).
- Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara (pasal 3)
- Kelompok delik penyuapan (pasal 5,6, dan 11)
- Kelompok delik penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9, dan 10)
- Delik pemerasan dalam jabatan (pasal 12)
- Delik yang berkaitan dengan pemborongan (pasal 7)
- Delik gratifikasi (pasal 12B dan 12C)

Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman. Menurut Wertheim (dalam Lubis, 1970) menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si Pemberi hadiah. Kadang-kadang orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi. bahwa balas jasa dari pihak ketiga yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat untuk diteruskan kepada keluarganya atau partainya/ kelompoknya atau orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi dengannya, juga dapat dianggap sebagai korupsi. Dalam keadaan yang demikian, jelas bahwa ciri yang paling menonjol di dalam korupsi adalah tingkah laku pejabat yang melanggar azas pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, pemisaham keuangan pribadi dengan masyarakat.^{viii}

Dari beberapa definisi korupsi tersebut menciptakan pemahaman masyarakat bahwa korupsi merupakan perbuatan tidak baik, curang, dapat disuap tidak

bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama materiil, mental dan hukum dengan penggunaan kekuasaan dan berbagai hal yang melekat pada dirinya sebagai pejabat publik untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain.

B.2. Motivasi Seseorang Melakukan Korupsi

Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun birokrat yang secara tidak wajar memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.^{ix} pada dasarnya perbuatan korupsi adalah perbuatan yang tidak wajar atau menyimpang guna mengeruk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berpengaruh pada kerugian keuangan negara. Perbuatan menyimpang tersebut menurut Hartanti (2007) disebabkan karena beberapa faktor, yaitu^x :

- a. Lemahnya pendidikan agama dan etika.
- b. Kolonialisme. suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
- c. Kurangnya pendidikan. Namun kenyataannya, kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar, dan terpandang. Sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat.
- d. Kemiskinan. Pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat.
- e. Tidak adanya sanksi yang keras.
- f. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku antikorupsi.
- g. Struktur pemerintahan.
- h. Perubahan radikal. Pada sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
- i. Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat.

Dari beberapa faktor-faktor tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang melakukan praktik-praktik korupsi karena dipengaruhi oleh 2 faktor. yaitu faktor internal dan eksternal dari dirinya. Sigmund Freud dalam teori psikoanalisis menyatakan bahwa kepribadian manusia itu terdiri dari tiga sistem, yaitu *id*, *ego*, dan *superego*. *Id* adalah komponen kepribadian yang hadir sejak lahir, didalamnya termasuk perilaku naluriah yang didorong prinsip kesenangan. *Ego* adalah komponen kepribadian yang bertanggungjawab untuk menangani dengan realitas. *Ego* bekerja berdasarkan prinsip realitas, yang berusaha memuaskan keinginan *id* dengan cara yang realistis dan sosial yang sesuai. Sedangkan *superego* adalah aspek kepribadian yang menampung semua standar internalisasi moral dan cita-cita yang kita peroleh dari kedua orang tua, masyarakat, rasa benar dan salah. *Superego* memberikan pedoman untuk membuat penilaian.

Psikoanalisis memberikan gagasan yang mendasar bahwa semua pikiran dan tindakan sadar adalah proses yang tidak disadari dan diringkas dalam frase pikiran yang tidak sadar. Perilaku dalam kehidupan sehari-hari merupakan perilaku sadar dalam ketidaksadaran. Karena dalam perilaku sadar terpendam perilaku yang tidak disadari yang akhirnya mempengaruhi perilaku sadar. Freud menjelaskan bahwa :

Tugas pertama yang diserahkan psikoanalisis adalah menjelaskan neurosa-neurosa. Dengan berpangkat pada resistensi serta transferensi dan mengikutsertakan amnesia sebagai fakta yang ketiga, psikoanalisis berhasil menyusun suatu teori tentang represi dan memperlihatkan peranan yang dimainkan oleh naluri-naluri seksual dan ketidaksadaran dalam neurosa-neurosa.^{xi}

Manusia memiliki dorongan-dorongan psikis yang berprinsip pada kesenangan (*pleasure principle*) yang mendasar yang bersarang dalam *id*. Namun dorongan ini mendapat hambatan atas prinsip realitas, yaitu *ego* yang bertugas membatasi dorongan primitif sesuai dengan prinsip realitas dan *Superego* yang berprinsip kepada norma. Dorongan psikis *id* merupakan dorongan pada norma. Dorongan psikis *id* merupakan dorongan yang paling besar membentuk perilaku berasal dari *id*.

Ego manusia lambat laun terlatih dengan pengaruh kepentingan eksternal untuk menghargai realita dan mengejar prinsip realita, dan dalam berbuat itu, harus melepaskan untuk semetara atau selamanya bermacam objek dan tujuannya – tidak hanya secara seksual – keinginan untuk memperoleh kenikmatan. Tetapi meninggalkan kenikmatan adalah selalu merupakan hal yang sulit bagi manusia. Ia tak dapat berhasil tanpa suatu kompensasi.^{xii}

Manusia, meskipun sudah membatasi perilakunya dengan prinsip realitas, usaha mencari kesenangan masih tetap menjadi dorongan psikis dalam ketidaksadaran yang kuat menuntut untuk dipenuhi. Dorongan-dorongan naluriah ada dalam setiap makhluk hidup yang berprinsip pada kesenangan yang dibatasi oleh *ego* dan *superego*. Dorongan *id* yang tidak bisa diterima oleh masyarakat akan direpres, sehingga lama kelamaan akan membentuk suatu tekanan psikologis yang memerlukan cara tertentu untuk mengungkapkannya sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat. Begitu juga dengan kasus korupsi yang terjadi di negeri ini. Memberantas korupsi tidak hanya memperhatikan diri sendiri, penyebab timbulnya korupsi apakah disebabkan lingkungan kecil atau lingkungan yang lebih luas serta bagaimana struktur masyarakat menggunakan nilai-nilai budaya berkaitan dengan korupsi. Dalam hal ini, pemimpin negara perlu memberikan contoh sehingga masyarakat memahami nilai-nilai apa yang dapat dianut masyarakat.

B.3. Peran Perempuan dalam Korupsi

Munculnya banyak nama perempuan dalam jeratan kasus korupsi ini menyiratkan adanya emansipasi perempuan pada berbagai bidang telah berjalan dengan baik termasuk juga pada ranah korupsi. Munculnya feminisasi korupsi yang disampaikan oleh Muhammad Afifuddin^{xiii} yang dilatar belakangi keterlibatan perempuan sebagai aktor penting dalam jejaring mafia perampok uang rakyat dalam kasus-kasus yang mencuat keranah publik. Asumsi yang dapat diambil adalah uang tidak punya jenis kelamin dan tidak bisa memilih siapa yang menjadi pemiliknya. Siapa pun tentunya mempunyai `bakat' korupsi asalkan ada niat dan kesempatan yang tepat pastilah bisa jadi korupsi itu. Melihat rentetan kejadian kasus per kasus di mana keterlibatan perempuan menjadi variabel vital dalam skenario perampokan anggaran rakyat tersebut, tampaknya kebetulan sukar untuk dinalar.

Fenomena perempuan banyak tersangkut korupsi merupakan gejala yang relatif baru di Indonesia. Tekanannya bukan pada persoalan kebetulan atau *by design*, melainkan lebih pada bagaimana kita memaknai perubahan sosiologis

dalam konteks gender dan feminisme yang bersangkutan paut dengan skandal-skandal keuangan tersebut. Keran Euforia antidomestifikasi kebebasan sosial-politik yang terbuka pasca-reformasi rupanya berdampak positif pada kian menguatnya akselerasi perempuan di sektor publik. Setelah sekian lama terdomestifikasi oleh wacana dan kebijakan yang bias gender, pelan tapi pasti perempuan di Indonesia mulai menemukan `jati diri'. Maraknya gerakan dari kaum feminis yang menuntut adanya kesamaan hak dan kesempatan (*equality of opportunity*) untuk mengakses sumber daya sosialekonomi-politik seperti halnya laki-laki, mulai banyak diafirmasi para pemangku jabatan dan pengambil keputusan di negeri ini.^{xiv}

Keadaan di Indonesia ini menjadi penting mengingat beberapa penelitian, yang membuktikan adanya hubungan antara tingkat korupsi yang rendah suatu Negara dengan partisipasi perempuan di pemerintahan. Berdasarkan studi yang dilakukan Bank Dunia tahun 1999 terhadap 150 negara, menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan yang tinggi diparlemen akan mendorong turunnya tingkat korupsi disuatu Negara. Hal tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh Vivi Alatas tahun 2006 terhadap perilaku korup di 4 negara yakni: Australia, India, Indonesia, dan Singapura tidak ditemukan yang signifikan dari perilaku korup laki-laki dan perempuan. Perbedaan perilaku korup menurut penelitian ini tidak didasarkan Gender namun oleh Budaya. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada perspektif dalam menilai perilaku wanita dalam korupsi. Selanjutnya dalam survei yang dilakukan *Transparency International's Global Corruption Barometer* pada tahun 2009 di lebih 60.000 rumah tangga di lebih 60 negara, membuktikan secara konsisten bahwa perempuan lebih sedikit membayar suap di bandingkan laki-laki.^{xv}

Selain itu adanya perempuan-perempuan di Indonesia yang menduduki jabatan-jabatan penting seperti menteri, kepala daerah, dan ketua komisi menunjukkan adanya peningkatan kualitas kinerja yang cukup baik. Akan tetapi masih kurang mengertinya perempuan pada ranah-ranah baru yang awam sama sekali nampaknya membuat diri mereka mudah terjebak dalam kesalahan tanpa disadari. Berhembusnya isu perempuan sangat berperan dalam korupsi ini merupakan salah satu bukti ketidakadilan gender. Pada kenyataannya perempuan selalu menjadi korban untuk masalah apapun termasuk dalam isu korupsi terutama saat menjadi korban atau pelaku. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana media memberitakan perempuan terkait masalah korupsi. Perlakuan publik juga buruk terhadap perempuan tersangka korupsi. Disinilah ketidakadilan gender itu terlihat jelas. Namun perempuan bagaimanapun punya potensi untuk ikut andil dalam memberantas korupsi.

B.4. Faktor Penghambat Perempuan Terjerat Korupsi

Euforia yang diusung dalam pengurustamaan gender dalam berbagai aspek termasuk dalam jabatan penting dalam dekade terakhir ini juga menjadi pendorong adanya perempuan yang masuk ke alam kancah kepemimpinan. Kaum feminisme yang mendesak adanya perlakuan setara antara laki-laki dan perempuan yang kemudian membuka akses publik untuk mengakomodir perempuan untuk berkecimpung dalam berbagai aspek terutama aspek sosial, ekonomi dan politik yang selama ini di jabat oleh para lelaki. Penghambat terjeratnya perempuan dalam ranah korupsi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

a. Gaya Kepemimpinan

Korupsi erat hubungannya dengan kewenangan dan kekuasaan, sedangkan cara menjalankan kekuasaan itu sendiri erat hubungannya dengan gaya kepemimpinan di suatu organisasi. Tulisan Robbins (1998)

melalui studi pustaka terhadap sejumlah literatur, pada dasarnya masih mempertanyakan apakah perilaku seorang pemimpin dikarenakan adanya hormon yang dikandung di dalam tubuh dan otaknya. Akan tetapi ia mengakui bahwa studi yang menunjukkan bukti-bukti bahwa kepemimpinan memiliki akar biologis, semakin meningkat. Dari tinjauan pustaka tersebut, meningkatnya tingkat hormone serotonin dapat memperbaiki kemampuan melakukan sosialisasi dan mengontrol agresi. Semakin tinggi tingkat testosteron, semakin tinggi tingkat dorongan berkompetisi.^{xvi}

Baik laki-laki maupun perempuan, keduanya memiliki hormon ini. Tetapi jika dibandingkan dengan laki-laki, tubuh laki-laki secara alami menghasilkan sepuluh kali lebih banyak dari pada Perempuan. Dengan demikian wajar saja laki-laki lebih agresif dibandingkan dengan perempuan.

Dilihat dari sisi sejarah, sebagian besar pemimpin di Indonesia adalah laki-laki. Tercatat, hanya Presiden ke lima lah (Megawati Soekarno Putri) yang merupakan putri dari mantan Presiden Soekarno yang pernah memimpin negeri ini. Mengutip dari *quotation* Lord Acton pada pertengahan abad 19. Pada desertasi tersebut Acton melontarkan istilah yang cukup terkenal hingga kini yaitu "*Power Tends to Corrupt, Absolute Power Tends to Corrupt Absolutely*". Istilah tersebut sangat tepat untuk menggambarkan penguasa yang ingin menyalahgunakan kekuasaannya. Korupsi pada *quotation* tersebut bukan hanya terkait uang, melainkan juga politik atau kebijakan. Dengan demikian ada kecenderungan korupsi itu muncul karena adanya kekuasaan yang membuat para pemimpin tersebut menjadi serakah dan rakus.

Selain itu, perempuan memiliki gaya kepemimpinan yang lebih *democratic*, sedangkan laki-laki merasa lebih nyaman dengan gaya yang bersifat *directive* (menekankan pada cara-cara yang bersifat perintah). Perempuan cenderung mengadopsi gaya kepemimpinan yang lebih demokratik. Mereka mendorong partisipasi, berbagi kekuasaan dan informasi, dan mencoba untuk meningkatkan "kemanfaatan" bagi pengikutnya. Mereka cenderung memimpin melalui pelibatan atau pemberdayaan dan mendasarkan pada kharisma, keahlian, kontak, dan keahlian interpersonal dalam mempengaruhi orang lain. Sebaliknya laki-laki cenderung lebih menggunakan gaya yang mendasarkan pada kontrol dan perintah. Mereka lebih mendasarkan pada jabatan otoritas formal sebagai dasar baginya untuk melakukan pengaruhnya.

Keterbatasan yang diciptakan dalam kepemimpinan perempuan adalah dimana perempuan dianggap sebagai warga Negara kelas dua setelah laki-laki yang terdogmatis sejak dahulu kala menyebabkan ruang gerak perempuan sebagaimana aktualisasi dirinya menjadi sangat terbatas. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Charlotte Bunch^{xvii}, dalam tujuan jangka panjang dari feminisme global adalah

- 1) Hak perempuan atas kebebasan untuk memilih, dan kekuatan untuk mengendalikan hidupnya sendiri di dalam dan di luar rumah. Memiliki kekuasaan atas hidup dan tubuh kita sendiri adalah esensial untuk memastikan adanya kebanggaan dan otonomi pada setiap perempuan.

- 2)penghapusan semua bentuk ketidakadilan dan opresi dengan menciptakan tatanan sosial dan ekonomi yang lebih adil, secara nasional dan internasional. Hal ini berarti keterlibatan perempuan di dalam perjuangan kebebasan nasional, dalam perencanaan pembangunan nasional, dan perjuangan bagi perubahan ditingkat local dan global.

Indonesia sendiri pemberian celah kepemimpinan kepada perempuan baru benar-benar bergelora pada pasca-turunnya Soeharto dan Orde Barunya. Dimana yang diketahui banyak orang adalah pemimpin haruslah laki-laki. Kemudian banyaknya perempuan yang berkarier diluar birokrasi dan parlemen juga menekan angka keterlelibatan perempuan, hal tersebutlah yang mendorong bergulirnya wacana quota 30% dalam parlemen agar keterwakilan suara perempuan dapat diakomodir. Memang wacana ini sangat berdampak besar dalam keterwakilan perempuan dalam parlemen akan tetapi ketidaksiapan para perempuan untuk berkiprah dalam bidang yang baru yang telah sekian lama dikuasai oleh para lelaki ini membuat adanya kebingungan yang kadang tidak dapat ditanggulangi.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Sri Budi Eko Wardhani menilai politisi perempuan yang duduk di legislatif mudah terjerat kasus korupsi atau suap lantaran masih belum menguasai tentang lika-liku politik.^{xviii} Perempuan masih awam soal politik, sehingga mudah terseret kasus hukum mengingat aturan-aturan yang dilaksanakan dalam system perpolitikan Indonesia itu sangat rumit dan celah-celah peraturan hukum siap menjerat apabila perempuan pemimpin yang mendapatkan jabatan dan kekuasaan ini tidak mengerti bagaimana melaksanakan dan menggunakan jabatannya secara baik dan benar. Sehingga tidak bisa pungkiri namanya kekuasaan dekat sekali dengan tindak korupsi, sehingga perempuan punya peluang untuk melakukan korupsi baik disadari maupun tidak disadari. Selain itu politisi yang berasal dari parpol termasuk juga politisi perempuan mau tidak mau tunduk kepada keinginan parpol, hal inilah juga yang mendorong adanya kepatuhan terhadap parpol.

Kemudian dalam sisi birokrasi secara normative, setiap PNS baik laki-laki maupun perempuan memiliki peluang yang sama untuk menduduki jabatan struktural sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, pada kenyataannya hanya sedikit PNS perempuan yang mampu menduduki jabatan karier tertinggi dengan alasan semata-mata kodrati perempuan seperti hamil dan melahirkan yang dikhawatirkan akan mengganggu tugas jabatan yang diemban, alasan selanjutnya yang selalu didengung-dengungkan adalah "*tidak baik perempuan memimpin laki-laki, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai ketimuran dan belum tentu laki-laki mau dipimpin perempuan, kemudian resiko dinas luarkota yang mengganggu keluarga*"^{.xix} Alasan tersebut secara tidak langsung menutup celah normative yang diberikan untuk menjadi seorang Pemimpin pada perempuan. Memang ada kesempatan yang diberikan kepada perempuan untuk menjadi seorang pemimpin atau pun pejabat karier akan tetapi diberikannya "label" yang secara tidak langsung

dilekatkan untuk membatasi ruang gerak perempuan terutama melalui sisi adat kebudayaan di Negara ini.

b. Politik: Partisipasi Perempuan

Kebijakan politik mengenai pemberdayaan dan partisipasi perempuan pada ranah politik ini mulai terbuka setelah bergulirnya reformasi 1998. Sebagaimana partisipasi politik perempuan, partai politik memiliki peranan yang penting dalam manifesto politik yang tercipta dari proses demokrasi. Dimana parpol meletakkan dasar fundamental terutama untuk kaderisasi pemimpin kedepannya. Keterlibatan perempuan dalam manajemen parpol masih sangat rendah dan secara sistem sangat kecil dilaksanakan. Kemudian secara kualitas keterlibatan perempuan dalam dunia politik harus dengan *affirmative action* yang artinya harus ada kuota yang mengharuskan perempuan dilibatkan dalam aktivitas politik baik diparpol maupun pada pemerintahan. Hal ini menjadi penting agar perempuan tidak terisolasi dalam kehidupan politik.^{xx}

Kegiatan parpol yang kebanyakan didominasi oleh lelaki, menciptakan budaya partai yang bekerja seandainya sendiri tanpa ada kesetaraan gender didalam pelaksanaan kegiatan parpol. Untuk masuk kedalam parpol sendiri perempuan harus memiliki "*sumberdaya ekonomi*" yang mumpuni, sehingga dapat dikatakan kemiskinan membatasi partisipasi politik perempuan. Sebagaimana ketahui, proses penjurangan calon legislatif dan kepala daerah mensyaratkan harus memiliki rekening tabungan bank yang dananya lumayan besar. Mengingat keadaan seperti itu kebanyakan perempuan merupakan ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan sendiri dan kalau memiliki penghasilan sendiri tentu tidak sebegitu besar.^{xxi} Keadaan ini juga terjadi pada tataran birokrasi, sudah menjadi rahasia umum kalau ingin naik jabatan harus "*membeli kursi*" dengan menyetorkan sejumlah uang kepada pemangku jabatan yang menentukan pergeseran dan promosi jabatan.

Keterbatasan-keterbatasan inilah yang mengakibatkan minimnya perempuan yang aktif pada jabatan karier yang tinggi atau sebagai anggota parpol yang masuk kedalam perwakilan di parlemen. Sehingga korupsi yang dilakukan oleh perempuan berbanding lurus dengan keterwakilan perempuan pada jabatan prestisius berdasarkan jumlah perempuan yang pada jabatan tinggi.

c. Sudut Pandang Agama

Kajian tentang perempuan dan kesetaraan merupakan sebuah kajian yang tidak pernah surut dalam tiap ruang dan waktu, termasuk didalamnya tentang kepemimpinan perempuan. Hal ini disebabkan oleh sebuah konstruksi masyarakat yang seolah menempatkan perempuan dalam posisi minor, dari dahulu, mungkin, hingga sekarang. Ada sebuah hadis yang selalu dijadikan sebagai alat untuk melgitimasi superioritas seorang laki-laki dalam kepemimpinan. Yakni sebuah riwayat Abi Bakarrah R.A yang kurang lebih terjemahannya sebagai berikut :

"....Ketika sampai kepada Nabi berita tentang bangsa Persia yang mengangkat anak perempuan Kisra sebagai Ratu mereka, Nabi bersabda: "Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan."

Perlu diperhatikan dari bangunan kalimat tersebut adalah tidak adanya *forbidden statement* atau ungkapan pelarangan, melainkan sebatas peramalan akan sesuatu yang masih belum pasti karena masih bersifat asumtif. Walaupun disampaikan oleh Nabi, tapi kemungkinan mengandung makna lain dibalik statemen tersebut, masih perlu untuk dilacak bersama lewat sentuhan historis–sosiologis.^{xxii}

Hadis di atas diriwayatkan oleh Bukhari yang dalam pemahaman ulama semua hadisnya tidak perlu dipertanyakan, sehingga sebagian besar ulama menerima bulat-bulat hadis ini. Ditinjau dari sejarahnya, hadis tersebut masih memiliki kelemahan-kelemahan. Struktur sosial yang terjadi di masa itu masih sangat patriakal, sehingga kepemimpinan perempuan masih perlu untuk dihindari karena perempuan pada waktu itu masih *unqualified*. Perbedaan biologis tidak berarti menimbulkan ketidaksetaraan dalam kehidupan. Fungsi-fungsi biologis harus dibedakan dari fungsi-fungsi sosial. Dalam kepemimpinan nilai yang di anggap paling dominan adalah kualitas dan kepribadian yang meliputi kemampuan dan kapasitas, pengalaman dan kemampuan kepemimpinan.

Dengan demikian, terjadinya korupsi bukan karena adanya perbedaan cara pandang antara laki-laki dan perempuan. Terjadinya korupsi dalam pembahasan ini adalah kurangnya pengetahuan, kemampuan, kapasitas, dan pengalaman serta skill kepemimpinan dari orang tersebut, bukan karena perbedaan gender yang berpengaruh pada perilakunya.

d. Psikologi Perempuan

Melihat dari perspektif psikologi perempuan dengan laki-laki sudah dari sejak lahir laki-laki lebih mengandalkan logika pemikiran secara rasional dibanding perempuan. Begitu pula dengan perempuan yang sejak lahir perasaan dibanding logika berfikir yang dimiliki walaupun kadang perempuan lebih cermat dan teliti dibanding laki-laki. Perempuan secara psikologis jauh lebih lemah, sekuat-kuatnya psikologis perempuan tetap membutuhkan tempat untuk berkeluh kesah. Perempuan juga mudah goyah dalam pendirian melihat realitas dan pengaruh perasaan yang dirasakannya. Faktor psikologis yang dimiliki perempuan membuat mereka untuk berpikir berkali-kali untuk melakukan sebuah tindakan termasuk tipikor. Perempuan lebih berspekulasi dan memiliki kekhawatiran akan tindakan yang akan dilakukannya. Hal ini lah yang mengakibatkan perempuan cenderung berhati-hati dalam mengambil tindakan karena memperhitungkan dampak baik dan buruk yang akan diterimanya dari perilakunya tersebut. Sedangkan laki-laki dari dilahirkan memiliki rasa berani dan menikmati tantangan dengan segala konsekuensi yang ada.

Melalui buku *The Complex Cinderella: Ketakutan Tersembunyi Wanita Kemerdekaan*, Dowling (1981) melakukan penelitian di Amerika kepada para wanita mandiri. Dalam kesimpulan berdasarkan penelitian dan kisah kehidupan para wanita mandiri tersebut ternyata wanita takut untuk bertanggungjawab atas kehidupan mereka sendiri (*Publisheus Weekly*). Menurut Dowling, [perempuan](#) termotivasi oleh hasrat tak sadar untuk dijaga sebagai takut [kemerdekaan](#) yang disebut "*Cinderella kompleks*". Sebuah aspek penting dari pekerjaan dapat didefinisikan

sebagai identifikasi aspek dari fenomena yang lebih besar seperti mengapa perempuan memilih untuk tinggal dalam hubungan disfungsional. Ini fenomena dapat didefinisikan sebagai suatu sindrom yang ditandai oleh serangkaian motivasi tertentu atau penyebab. Dowling mengidentifikasi hanya satu motivasi, sedangkan sindrom sebenarnya kombinasi dari motivasi banyak, yang dalam diri mereka sendiri karakteristik yang membentuk kompleks. Hal ini didasarkan pada gagasan feminitas digambarkan dalam cerita itu, di mana seorang wanita cantik,, anggun, sopan, mendukung, pekerja keras, mandiri, dan difitnah oleh perempuan dari masyarakat, tapi dia tidak mampu mengubah situasi itu dengan sendiri tindakan dan harus dibantu oleh kekuatan luar, biasanya laki-laki (yaitu Pangeran).^{xxiii}

Cinderella Complex itu sendiri dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Faktor Eksternal meliputi peran penting lingkungan pada tumbuh kembangnya. Budaya, pola asuh orang tua serta media massa memiliki pengaruh yang cukup penting. Sedangkan faktor internalnya adalah harga diri. Individu yang tergantung memiliki harga diri yang rendah sehingga membutuhkan bimbingan dan dukungan dari orang lain. Jika tugas-tugas yang diemban oleh perempuan dalam jabatan publik tersebut dianalogikan sebagai sebuah tekanan dalam dunia politik, tentunya seorang perempuan cenderung lebih mudah untuk menyerah dan membutuhkan berbagai macam bantuan untuk mampu mandiri dan *survive* dari berbagai tekanan politik. Sehingga dengan adanya tekanan tersebut, perempuan lebih rentan untuk berperilaku menyimpang untuk menyelamatkan dirinya (dianalogikan dengan meminta bantuan orang tua dan orang terdekat untuk menyelesaikan tugas-tugas) karena tidak semua politikus saat ini benar-benar memegang teguh pada prinsip atau ideologi yang dianutnya saat ini. Akibatnya perempuan lebih mudah terjebak dalam perangkat-perangkat korupsi yang ada di dunia politik baik itu disengaja maupun tidak.

e. **Budaya Ketimuran**

Konsepsi budaya ketimuran, meletakkan perempuan sebagai “*kanca wingking*” yang berarti perempuan itu berada dibelakang laki-laki. Sebagai konsekuensi dari konsepsi ini adalah posisi tidaklah penting bagi perempuan untuk keluar rumah karena garda terdepan adalah ranah laki-laki. Konsepsi ini membuat perempuan menjadi tidak antusias untuk terlibat dalam urusan di luar ranahnya.^{xxiv} Kemudian tradisi budaya ketimuran terutama tradisi jawa dimana mengejawantahkan bahwa kesuksesan sebuah keluarga tergantung dari peran perempuan sebagai istri dan ibu. Laki-laki adalah pemimpin perempuan sehingga perempuan harus berada dibelakang laki-laki apapun kondisinya. Hal inilah yang menjadi sebuah harga mati dari dogma yang ditanamkan secara turun-temurun kepada anak-anak perempuan sehingga membatasi para perempuan untuk mengembangkan sayap membuka jaringan didunia luar.

Jika karena alasan aktualisasi diri dan tuntutan zaman maka wanita harus bekerja (dalam Islam), wanita tetap harus memegang norma dan etika. Bahwa secara alami ini tetap menuntutnya untuk berperan sesuai dengan kodratnya. Jika ia berkarir, ia bersuami, ia juga mempunyai anak,

dan ia juga bagian integral dari masyarakat. Peran ini menyatu dalam diri wanita.^{xxv} Tentunya wanita harus menanamkan peranannya dan menjadikan pria bagian dari kehidupannya. Melalui konsepsi yang diberikan secara berkelanjutan kepada setiap generasi penerus seperti ini akan sangat membatasi ruang bergerak para perempuan. Sehingga karena tidak memiliki jaringan yang cukup kuat dan luas serta mengingat kodrati perempuan memberikan batasan ruangan untuk perempuan untuk melakukan korupsi. Secara psikologi dan budaya, kemungkinan perempuan melakukan korupsi itu lebih kecil dibandingkan dengan kemungkinan yang dimiliki oleh laki-laki karena ranah jangkauannya yang sangat luas.

B.4. Peran Perempuan dalam Pemberantasan Korupsi

Masalah perempuan dan korupsi tidak ada hubungannya dengan identitas perempuan itu sendiri, tetapi korupsi adalah semata-mata persoalan kekuasaan dan kesempatan saat melakukan. Tidak bisa dipungkiri perempuan menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi. Peran perempuan sebagai ibu, istri, pergaulan dalam komunitas atau rekan kerja adalah kekuatan dominan dalam hal pemberantasan korupsi. Tapi melihat dari perspektif gender dan gerakan antikorupsi, peran perempuan bukan hanya sebatas pencegahan tindakan korupsi di level mikro keluarganya, akan tetapi juga bisa berperan di komunitas dan lingkup kerjanya. Perempuan memiliki tiga ruang; domestik, produksi dan komunitas. Setiap ruang itu perempuan bisa berperan. Antara lain sebagai berikut peran perempuan dalam beberapa lingkup :

1. Keluarga

Diantara peran perempuan yang memiliki pengaruh besar adalah menjadi pendidik dalam keluarga untuk mendorong generasi muda untuk bertindak jujur. Perempuan juga sebagai filter itu memang bisa dilakukan. Perempuan yang memiliki ketelitian yang cermat dan detail, bisa diberdayakan untuk mengurangi peluang laki-laki untuk melakukan korupsi dengan cara menanyakan asal usul uang yang diberikan kepada perempuan (istri/ibu). Perempuan bisa menjadi agen untuk pencegahan sekaligus supporter bagi gerakan anti-korupsi. Melalui mendidik dan mempersiapkan anak-anaknya dengan menanamkan nilai moral, budaya malu atas kesalahan dan kebohongan serta kejujuran itu yang paling hakiki. Karena pada generasi ini telah terjadi degradasi moral yang luarbiasa sudah tidak ada lagi yang namanya budaya malu dan rasa sungkan saat melakukan kesalahan. Peranan ini menjadi sangat penting untuk mempersiapkan generasi penerus kedepannya.

2. Lingkungan Kerja

Perempuan bisa mulai dengan mengkampanyekan gagasan transparansi. Gagasan tentang transparansi ini harus dikampanyekan di segala lingkup.^{xxvi} Selain itu pola hidup perempuan yang dirasa konsumtif dan penuh rasa persaingan terutama untuk kalangan jetset "sosialita"serta kalangan pekerja, agaknya pola hidup seperti harus diganti dengan pola hidup yang teratur/disiplin, sederhana dan sewajarnya juga akan mengurangi tekanan kepada laki-laki untuk mencari tambahan demi mencukupi kebutuhan perempuan-nya. Karena banyak laki-laki beralasan melakukan korupsi disebabkan oleh tuntutan perempuan-perempuan (istri dan anak) mereka. Demi memenuhi kebutuhan tersebutlah para laki-laki

melakukan korupsi. Sehingga dapat dikatakan bahwa perempuan merupakan ujung pangkal dalam pemberantasan korupsi mengingat peran yang dimiliki yang tidak bisa dilepaskan secara langsung baik secara kodrati maupun jenjang kariernya.

3. Komunitas

Untuk menunjukkan eksistensinya biasanya perempuan secara aktif terlibat dalam beberapa kegiatan pada suatu komunitas tertentu sesuai dengan minat dan keinginan yang ingin dicapai. Melalui keikutsertaannya pada kegiatan-kegiatan ini bisa pula perempuan menyelipkan pendidikan dan sosialisasi mengenai kejujuran dan memperbaiki moral. Lewat percakapan ringan ini besar harapannya bisa saling mempengaruhi terutama obrolan ibu-ibu biasanya membawa dampak secara tidak langsung yang biasanya akan menjadi topic pembicaraan diberbagai tempat lain. Dengan adanya pembicaraan dari mulut ke mulut dengan yang membawa niatan baik untuk mengingatkan pentingnya aspek kejujuran dan nilai moral serta budaya malu ini besar harapannya generasi pada decade ini memiliki perubahan pemikiran menjadi lebih baik dan member contoh yang baik pula untuk generasi berikutnya. Karena lebih baik meninggalkan ilmu yang bermanfaat dibandingkan banyak harta tetapi tidak memberikan kebaikan.

C. PENUTUP

Dari paparan diatas dapat diambil simpulan bahwa :

1. Setiap orang memiliki bibit dan kecenderungan untuk melakukan korupsi. Korupsi tidak memandang “embel-embel” apapun yang melekat pada pelakunya terutama jenis kelamin. Namun pada perempuan karena factor gaya kepemimpinan, politik, agama, psikologis, kodrati dan budaya ketimuran yang membatasi ruang gerak perempuan dalam aktualisasi diri dan sekaligus sebagai pelindung perempuan dari jerat korupsi. Sehingga, perempuan cenderung tidak korup dibanding laki-laki pada ranah publik.
2. Perempuan memiliki andil yang cukup besar dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Perannya yang cukup strategis pada lingkup keluarga, lingkup kerja dan komunitas, perempuan biasanya bisa saling mengingatkan melalui berbagi ilmu dan saran. Melalui media inilah diharapkan ajakan menanamkan nilai moral, kejujuran dan budaya malu. Peran perempuan ini tentunya juga tidak lepas dari peran laki-laki mau ikut andil dan aktif atau tidak dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi karena baik laki-laki maupun perempuan juga bisa terlibat dalam korupsi.

DAFTAR RUJUKAN

- ¹ Suyanto Aw & Sri Puji Astuti. (2010), *Stereotip Perempuan Dalam Bahasa Indonesia Dalam Ranah Rumah Tangga* Diunduh Dari [Http://Staff.Undip.Ac.Id/Sastra/Suyanto/](http://Staff.Undip.Ac.Id/Sastra/Suyanto/) Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2012 Pukul 14:10 WIB
- ¹ Chomsky, Noam (2006), *Failed State, The Abuse of Power and The Assault on Democracy*. Diunduh dari <http://libgen.info/view.php?id=306037>. Diakses pada tanggal 16 Juni 2012 pukul 00.17 WIB
- ¹ Rozi, [Fahrur](#). (2012). *Mengapa Perempuan Ikut Korupsi?* Diunduh Dari [Http://www.Al-Khilafah.Org/2012/02/Mengapa-Perempuan-Ikut-Korupsi.Html](http://www.Al-Khilafah.Org/2012/02/Mengapa-Perempuan-Ikut-Korupsi.Html) Diakses Pada Tanggal 30 Mei 2012 Pukul 19:45 WIB
- ¹ Nurdjana Dkk, 2005, *Korupsi&Illegal Logging Dalam System Desentralisasi* , Cetakan Ke-2, Yogyakarta, Pustaka Pelajar; Hal 20

- ¹ _____ . www.transparency.org/news_room/faq/corruption_faq diunduh pada tanggal 18 juni 2012 pukul 09:29 WIB
- ¹ _____ . "Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank, diunduh dari <http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/corruptn/cor02.htm> diakses pada tanggal 19 juni 2012 pukul 20:01 WIB
- ¹ _____ . FAQ KORUPSI DAN KPK diunduh dari http://www.kpk.go.id/modules/edito/content_faq.php?id=15 diakses pada tanggal 13 Juni 2012 pukul 09:47 WIB
- ¹ Revida, Erika, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya*, diunduh dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3800/1/fisip-erika1.pdf> diakses pada tanggal 10 Juni 2012 pukul 19:43 WIB
- ¹ _____ . <http://www.ti.or.id>. Transparency Internasional, dimuat dalam Wikipedia Indonesia, *Korupsi*. Diakses tanggal 17 Juni 2012 pada pukul 14.03 WIB
- ¹ Evi, Hartanti. (2007). *Tindak Pidana Korupsi*. Hal 11
- ¹ Freud, S (1983). *Sekelumit Sejarah Psikoanalisis*. Hal 47.
- ¹ Freud dalam Rader, M. (1962). *A Modern Book of Esthetics*. Hal 127.
- ¹ Afifuddin, Mohammad. *Feminisasi Korupsi*. Republika (15/2/2012) Diunduh Dari [Http://17-08-1945.Blogspot.Com/2012/02/Koran-Digital-Mohammad-Afifuddin.Html](http://17-08-1945.blogspot.com/2012/02/Koran-Digital-Mohammad-Afifuddin.Html) Diakses Pada Tanggal 3 Juni 2012 Pukul 22:17 WIB
- ¹ George Junus Aditjondro, *Op.Cit*, Afifuddin, Mohammad
- ¹ _____ . *Peran Wanita Dalam Pemberantasan Korupsi*, Diunduh Dari [Http://Kowani.Or.Id/7/?E=24&W=Idversion](http://Kowani.Or.Id/7/?E=24&W=Idversion) Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2012 Pukul 09:47 WIB
- ¹ Robbins, Stephen.P. (1998). *Organization Behavior : Concepts, Controversiess Application*, 8th ed.
- ¹ Tong, Rosemarie Putnam. (2004), *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis* . Jakarta; Jalan Sutra. Hal 331-332
- ¹ Wardhani, Sri Budi Eko. (2012). *Puskapol UI: Politisi Perempuan Mudah Terjerat Korupsi*. Diunduh Dari [Http://Dutakita.Com/Berita-Nasional/145-Puskapol-Ui-Politisi-Perempuan-Mudah-Terjerat-Korupsi](http://Dutakita.Com/Berita-Nasional/145-Puskapol-Ui-Politisi-Perempuan-Mudah-Terjerat-Korupsi) Diakses Pada Tanggal 3 Juni 2012 Pukul 09:58 WIB
- ¹ Mulia, Siti Musdah dan Farida, Anik. (2005). *Perempuan dan Politik*. Jakarta ; Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Hal 34-35
- ¹ Utami, Tari Siwi, (2001). *Perempuan Politik di Parlemen*. Yogyakarta ; Penerbit Gava Media hal 34-35
- ¹ *Ibid*. Utami hal 36
- ¹ Fawaidurrahman (2011). *Kepemimpinan Perempuan dalam Kajian Hadis (Melacak yang Terlupakan)*. Diunduh dari <http://fawaidroh.wordpress.com/2010/03/27/kepemimpinan-perempuan-dalam-kajian-hadist-melacak-yang-terlupakan/>. Diakses pada tanggal 18 Juni 2012 pukul 20.42 WIB
- ¹ _____, *Cinderella Complex* diunduh dari http://en.wikipedia.org/wiki/Cinderella_complex diakses pada tanggal 29 juni 2012 pukul 09:41 WIB
- ¹ *Ibid*, Mulia, hal 31
- ¹ *Rahmat*.(2010.). Problematika Wanita Mandiri dan Solusinya. *Diunduh dari* <http://bangrahmat.wordpress.com/2010/04/30/problematika-wanita-mandiri-dan-solusinya/> diakses pada 28 Juni 2012 pukul 21:23 WIB
- ¹ Ani Soetjipto. (21/4/2011). *Perempuan Agen Antikorupsi*. Diunduh dari http://www.antikorupsi.org/new/index.php?option=com_content&view=article&id=20444:ani-soetjipto-perempuan-agen-antikorupsi&catid=48:wawancara&Itemid=121&lang=id diakses pada tanggal 12 juni 2012 pukul 23:59 WIB
-
